

**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2025**

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (077) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

B. VISI : Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya

C. MISI

- : 01 Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi
- : 02 Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara
- : 03 Meningkatkan Kualitas Putusan

D. FUNGSI : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2025	2026	2027	2028
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Opini BPK atas Laporan Keuangan</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Integritas</p> <p>Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara</p> <p>Sasaran Strategis Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Kualitas Putusan</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi</p>	WTP			
		75			
		75			
		68			
		78			
077.01	<p>Eselon 1 Mahkamah Konstitusi Ri</p>	611,477,078	623,609,196	637,246,968	653,782,525
BJ	<p>Program Program Penanganan Perkara Konstitusi</p>	416,603,131	424,868,872	434,160,368	445,426,144
	<p>Sasaran Program Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu</p> <p>Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan</p>	80	80	80	

	Perkara Konstitusi				
	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	50	73	73	
	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18	Maksimal 18	Maksimal 18	
	Sasaran Program Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK				
	Indikator Kinerja Program Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	75	75	75	
	Sasaran Program Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat				
	Indikator Kinerja Program Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	80	80	80	
3372	KEGIATAN Penanganan Perkara Konstitusi	388,698,125	4,079,357	4,168,569	4,276,735
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	80 skor	80 skor	80 skor	0 skor
	- Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	50 %	73 %	73 %	0 %
	- Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18	Maksimal 18	Maksimal 18	0 Bulan
	- Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi	100 %	100 %	100 %	0 %
	- Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	95 %	95 %	95 %	0 %
	- Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya	70 %	70 %	70 %	0 %
	- Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80 %	80 %	80 %	0 %
	- Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum	80 %	80 %	80 %	0 %
	- Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik	75 %	75 %	75 %	0 %
	- Persentase General Administration System berbasis Elektronik	75 %	75 %	75 %	0 %
	- Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	80 Skor	80 Skor	80 Skor	0 Skor
	- Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	83 Skor	83 Skor	83 Skor	0 Skor
	- Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan	83 Skor	83 Skor	83 Skor	0 Skor
	- Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	0 %	0 %	0 %	0 %
	- Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	0 %	0 %	0 %	0 %
	- Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %

ABD	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,965,000			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
BCE	<u>KRO</u> Penanganan Perkara	364,133,125			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CAN	<u>KRO</u> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	15,600,000			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PBD	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,000,000	1,019,840	1,042,142	1,069,184
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
RAQ	<u>KRO</u> Sarana Bidang Hukum	1,000,000	1,019,841	1,042,144	1,069,186
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
UAE	<u>KRO</u> Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,000,000	2,039,676	2,084,283	2,138,365
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	9,000,000	9,178,563	9,379,290	9,622,665
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	75 Skor	75 Skor	75 Skor	0 Skor
	- Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3.25 Nilai	3.25 Nilai	3.25 Nilai	0 Nilai
	- Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	77 %	77 %	77 %	0 %
BDC	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8,000,000	8,158,724	8,337,150	8,553,482
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
UAB	<u>KRO</u> Sistem Informasi Pemerintahan	1,000,000	1,019,839	1,042,140	1,069,183
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	18,905,006	20,605,856	21,056,489	21,602,873

	<p>SASARAN KEGIATAN Terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase Diseminasi putusan MK di media elektronik</p> <p>KRO Kerja sama</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	0 %	0 %	0 %	0 %
AEC		5,500,000	7,648,800	7,816,072	8,018,886
BMA	<p>KRO Data dan Informasi Publik</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	13,405,006	12,957,056	13,240,417	13,583,987
WA	<p>Program Program Dukungan Manajemen</p>	194,873,947	198,740,324	203,086,600	208,356,381
	<p>Sasaran Program Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif</p> <p>Indikator Kinerja Program Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional</p>	95	95	95	
	<p>Sasaran Program Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya</p> <p>Indikator Kinerja Program Opini BPK atas Laporan Keuangan</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Indeks Layanan Administrasi Umum</p>	WTP A 83	WTP A 83	WTP A 83	
	<p>Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas</p> <p>Indikator Kinerja Program Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti</p>	80	80	80	
	<p>Sasaran Program Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya</p> <p>Indikator Kinerja Program Tingkat layanan perkantoran, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengamanan</p>	80	80	80	
	<p>Sasaran Program Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional</p> <p>Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM</p>	85 80	85 80	85 80	
3367	<p>KEGIATAN Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan</p>	94,464,333	99,421,624	101,935,742	104,984,069

	<p>SASARAN KEGIATAN Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu 85 % - Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan Dana 10 % - Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu 100 % - Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 80 % - Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan 83 Skor <p>SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi 95 % - Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan 100 % - Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 100 % 					
EBA	<p>KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	91,214,333	96,107,159	98,548,795	101,509,234	
EBD	<p>KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	3,250,000	3,314,465	3,386,947	3,474,835	
3369	<p>KEGIATAN Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi</p> <p>SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya.</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) 70 % - Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar MK 100 % - Persentase Digitalisasi Arsip Perkara 90 % - Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) 85 % - Persentase Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) 100 % - Tingkat layanan kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan 80 Skor - Persentase terpenuhinya sarana prasarana pelayanan publik sesuai permintaan 70 % <p>KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	95,509,614	94,321,514	96,044,388	98,133,341	
EBA	<p>KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	79,564,461	82,006,941	83,460,505	85,222,926	

EBB	KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15,945,153	12,314,573	12,583,883	12,910,415
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	550,000	560,901	573,168	588,038
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Tingkat Maturitas SPIP	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	0 Nilai
	- Tingkat Maturitas APIP	3 Level	3 Level	3 Level	0 Level
	- Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Laporan Hasil Pemeriksaan	85 %	85 %	85 %	0 %
	- Tingkat Layanan Pengawasan Intern	83 Skor	83 Skor	83 Skor	0 Skor
	- Persentase Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	0 %
	- Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN yang tepat waktu	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase Tindakanlanjutan atas Laporan, Pengaduan Masyarakat, WBS, Benturan Kepentingan dan Kejadian Pungli	100 %	100 %	100 %	0 %
	SASARAN KEGIATAN Terwujudnya Budaya Integritas MK				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju WBK dan WBBM	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	0 Unit Kerja
	- Persentase Pakta Integritas yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	0 %
EBD	KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal	550,000	560,901	573,168	588,038
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	4,350,000	4,436,285	4,533,302	4,650,933
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata laksana berbasis IT	90 %	90 %	90 %	0 %
	- Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi	100 %	100 %	100 %	0 %
	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi SDM	80 %	80 %	80 %	0 %
	- Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	80 Skor	80 Skor	80 Skor	0 Skor
EBA	KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal	200,000	203,966	208,426	213,835
	INDIKATOR KRO				

EBC	KRO Layanan Manajemen SDM Internal	3,950,000	4,028,355	4,116,452	4,223,266
	INDIKATOR KRO				
EBD	KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal	200,000	203,964	208,424	213,832
	INDIKATOR KRO				

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT		ALOKASI TAHUN 2025	
1		2	
Eselon 1			
077.01-2025 - Mahkamah Konstitusi Ri		611,477,078	
1. KELOMPOK BIAYA			
OPERASIONAL		170,028,794	
NON_OPERASIONAL		441,448,284	
2. JENIS BELANJA			
BELANJA PEGAWAI		91,214,333	
BELANJA MODAL		17,342,929	
BELANJA HIBAH		0	
BELANJA BANTUAN SOSIAL		0	
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG		0	
BELANJA SUBSIDI		0	
BELANJA PENYESUAIAN		0	
BELANJA BARANG DAN BARANG		502,919,816	
BELANJA LAIN-LAIN		0	
3. SUMBER DANA			
RM		611,477,078	
HIBAH VALAS		0	
HIBAH LUAR LANGSUNG		0	
RPLN		0	
BLU		0	
HDN		0	

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2025
1	2
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L	
OPERASIONAL	170,028,794
NON_OPERASIONAL	441,448,284
2. TOTAL JENIS BELANJA K/L	
BELANJA BARANG DAN BARANG	502,919,816
BELANJA PEGAWAI	91,214,333
BELANJA MODAL	17,342,929
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA HIBAH	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
3. TOTAL SUMBER DANA K/L	
RM	611,477,078
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	0

HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2025	2026	2027	2028
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	3,111,028	393,407	2,436,798	417,557
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	3,111,028	393,407	2,436,798	417,557

Jakarta, 1/10/2024
Sekretaris Jenderal
196906091993031001
Heru Setiawan